

**.PENDIDIKAN ETIKA BISNIS UNTUK MENINGKATKAN
KESADARAN**

HIDUP BERWAWASAN LINGKUNGAN

Siti Maroah

FE-UMSurabaya

e-mail : fe-umsby@gmail.com

Abstract

One of the most important social challenge for business is a balance between economic interests and maintain order terwujudkan ecologically sustainable development. Morals and ethics have a function to give the orientation of how and where we are heading in life, but the difference is that morality is a direct show of ways to go, while directing the choice of ethics precisely why you should move in suchaway?

Business ethics is the application of ethical thinking in general, in business behavior. Business ethics is not a specific part of ethics which is different from ethics in general and are applicable only to business. If dishonesty is considered unethical and immoral, then anyone in business who are not honest with shareholders, employees, consumers or competitors, have acted in an unethical and immoral. According to the conventional ideology of economic development and preservation is a dichotomy that separated from one another. When in fact, both have a very close relationship and jointly become a national agenda that must be considered by the government and society in a country. This means that without an adequate environmental protection, development will be lost meaning (undermined). Thus the nature of the sustainable development, are the balance between economic interests with ecological sustainability (ecology are: Science of learning about how living creatures interact with one another within an ecosystem). Economic learning goals lead students to have the ability to solve the various problems it faces. Therefore, through the educational values in business ethics expected of students have the knowledge and the provision to be applied in everyday life which would not intentionally or engage in business activities.

Kata kunci : Pendidikan Etika Bisnis, Kesadaran ramah lingkungan

Pendahuluan

Pendidikan dalam arti luas adalah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yaitu pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan pendidikan di luar sekolah, meski memiliki rencana dan program yang jelas tetapi pelaksanaannya relatif lebih longgar dengan berbagai pedoman yang relatif fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Sedangkan pelaksanaan pendidikan di dalam

keluarga dilaksanakan secara informal tanpa tujuan yang dirumuskan secara baku dan tertulis (Zamroni, 2000).

Etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai etika dalam kegiatan bisnis. Seperti etika terapan pada umumnya, bidang kajian etika bisnis dapat dikategorikan ke dalam level makro, mikro, individu, dan level internasional. Menurut Suseno (1989) dan Keraf (1991) bahwa ada perbedaan dan persamaan antara "etika" dengan "moralitas". Moral dan etika mempunyai fungsi memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup ini, namun perbedaannya bahwa moralitas langsung menunjukkan cara-cara untuk melangkah, sedangkan etika justru mengarahkan pada pilihan mengapa harus melangkah dengan cara yang demikian? Dengan kata lain moralitas adalah suatu pranata, sedangkan etika adalah sikap kritis setiap individu atau kelompok dalam mewujudkan moralitas.

Secara sederhana yang dimaksud dengan **etika bisnis** adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan yang diatur oleh hukum, bahkan merupakan standar yang lebih tinggi dibandingkan standar minimal ketentuan hukum, karena dalam kegiatan bisnis seringkali kita temukan wilayah abu-abu yang tidak diatur oleh ketentuan hukum.

Dengan semakin pesatnya perkembangan informasi, bila tanpa diimbangi dengan pemahaman tentang dunia bisnis yang ber "moral", maka dunia bisnis akan menjadi suatu rimba modern dan tentunya berlaku hukum rimba. Siapa kuat akan menindas yang lemah sehingga apa yang diamanatkan dalam UUD 1945, Pasal 33 yaitu menciptakan perekonomian yang demokratis dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, tidak akan pernah terwujud.

Harapan yang etis merupakan bagian penting dari lingkungan bisnis. Masyarakat mengharapkan bisnis menjadi etis dan menginginkan manajer perusahaan menerapkan prinsi-prinsip etika – dengan kata lain, pedoman tentang apa yang benar dan salah, adil dan tidak adil, mana yang bermoral dan tidak – apabila mereka membuat keputusan bisnis (Post, 2002). Standar etika dapat berbeda antara masyarakat satu dengan yang lainnya. Meskipun berbeda dalam memaknai etika, tidak mengesampingkan kesepakatan etika umum yang telah dicapai. Sebagai contoh, Pagam Sosial Uni Eropa memperkenalkan hak-hak pekerja dan perlakuan di tempat kerja secara manusiawi di antara bangsa-bangsa yang menjadi anggotanya; selain itu diadopsi juga sebuah perjanjian yang melarang penyuaian pejabat asing dalam perdagangan internasional.

Dalam sistem perekonomian pasar bebas, perusahaan diarahkan untuk mencapai tujuan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin, sejalan dengan prinsip efisiensi. Namun, dalam mencapai tujuan tersebut pelaku bisnis kerap kali menghalalkan berbagai cara tanpa peduli apakah tindakannya melanggar etika

dalam berbisnis atau tidak. Hal ini terjadi akibat manajemen dan karyawan yang cenderung mencari keuntungan semata sehingga terjadi penyimpangan norma-norma etis, meski perusahaan-perusahaan tersebut memiliki *code of conduct* dalam berbisnis yang harus dipatuhi seluruh organ di dalam organisasi. Penerapan kaidah *good corporate governance* di perusahaan swasta, BUMN, dan instansi pemerintah juga masih lemah. Banyak perusahaan melakukan pelanggaran, terutama dalam pelaporan kinerja keuangan perusahaan.

Salah satu tantangan sosial yang paling penting bagi bisnis adalah keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan mempertahankan ekologis. Pertanian, pertambangan, produksi industri, menghasilkan limbah dan polusi bersamaan dengan dihasilkan barang/jasa. Limbah dan polusi adalah efek samping yang ekstrak dan membutuhkan biaya tinggi untuk mengatasinya. Oleh karena itu terkait dengan ekologi dan masalah lingkungan, memaksa pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan pemahaman tentang bagaimana manusia berperilaku dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yaitu ada peningkatan ekonomi namun tidak merusak lingkungan (Post, et all 2002).

Permasalahan

1. Bagaimana kerangka konseptual pendidikan etika bisnis?
2. Apakah etika bisnis itu?
3. Mengapa pendidikan etika bisnis penting bagi masyarakat?
4. Mengapa kegiatan bisnis harus beretika?
5. Bagaimana pembangunan yang ramah lingkungan?
6. Bagaimana pendidikan etika bisnis membentuk kesadaran hidup yang ramah lingkungan?

Pembahasan

Pendidikan merupakan pilihan untuk mengubah kehidupan, melalui pendidikan peradaban manusia akan dapat ditingkatkan. Pendidikan sebagai salah satu sarana untuk dapat terpenuhinya semua kebutuhan. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan terbelakang.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan normatif bangsa itu akan dioperasionalkan dalam tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran ekonomi mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan berbagai persoalan ekonomi yang dihadapinya.

1. Kerangka Konseptual/Teori



2. Pengertian Etika Bisnis

Etika adalah sebuah konsep antara benar dan salah. Etika mengajarkan apakah perilaku kita bermoral atau tidak, dan terkait dengan hubungan manusia yang mendasar. Bagaimana kita berpikir dan bertindak terhadap orang lain dan bagaimana kita ingin orang lain berperilaku atau bersikap terhadap kita. Prinsip etika adalah pedoman bagi perilaku moral. Sebagai contoh, di dalam masyarakat, berbohong, mencuri, menipu, dan menyakiti orang lain dianggap tidak etis dan tidak bermoral. Kejujuran, menepati janji, membantu orang lain, dan menghormati hak-hak orang lain dianggap etis dan merupakan perilaku moral yang diharapkan. Aturan perilaku dasar seperti itu penting bagi kelangsungan dan kelanjutan kehidupan organisasi dimanapun.

Perilaku benar dan salah ini datang dari berbagai sumber. Agama adalah sumber pedoman etika yang utama untuk kebanyakan orang. Keluarga yang menjadi sumber perilaku benar dan salah kepada anak saat mereka tumbuh dewasa, demikian juga sekolah, guru, tetangga, teman, idola, bahkan media elektronik dapat mempengaruhi apa yang kita percaya sebagai hal benar atau salah dalam hidup. Proses pembelajaran ini membentuk konsep diri atas perilaku etik, moral, dan sosial yang dapat diterima. Inti keyakinan atas etika ini akan menjadi panduan yang membantu menuntun seseorang saat muncul kebingungan etika.

Etika bisnis adalah aplikasi dari pemikiran etika secara umum dalam perilaku bisnis. Etika bisnis bukanlah bagian khusus dari etika yang berbeda dari etika pada umumnya dan dapat diaplikasikan hanya untuk bisnis. Jika ketidakjujuran dianggap tidak etis dan tidak bermoral, maka siapa saja dalam bisnis yang tidak jujur terhadap pemegang saham, pegawai, konsumen atau kompetitor, telah bertindak tidak etis dan tidak bermoral. Jika melindungi orang lain dari bahaya dianggap etis, maka sebuah perusahaan yang menarik produk-produk yang berbahaya dianggap bertindak etis. Agar dianggap etis, maka bisnis harus membuat aturan yang jelas dari sumber yang sama tentang perilaku yang dianggap benar. Bisnis sebaiknya tidak membuat definisi tersendiri tentang apa yang benar dan salah. Pegawai dan manajer kadang harus bertindak di luar etika karena situasi bisnis, tapi masyarakat tidak dapat menerima pengecualian seperti ini (Post,el al,2002).

Bertnes, (2000) menguraikan bahwa konsep etika bisnis mempunyai makna yang terfokus pada nilai-nilai dan norma-norma moral dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Etika bisnis merupakan bidang kajian etika terapan, yang dapat diterapkan pada tiga taraf, yaitu : taraf makro, madya, dan mikro. Pada taraf makro , dipelajari aspek-aspek moral dari sistem ekonomi sebagai keseluruhan. Misalnya tentang keadilan, kejujuran, saling menghormati dan lain-lain. Pada taraf madya, etika bisnis mengkaji masalah-masalah etis di bidang organisasi yakni perusahaan. Sedangkan pada taraf mikro, fokus pada individu dalam hubungannya dengan ekonomi atau

bisnis seperti misalnya tanggung jawab etis seorang karyawan terhadap perusahaannya, manajer, konsumen dan sebagainya.

Jadi perusahaan dalam menjalankan tugasnya memproduksi barang/jasa untuk disajikan kepada masyarakat atau konsumen, tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan antara kepentingan masyarakat umum dengan kepentingan perusahaan. Benturan kepentingan ini banyak terjadi baik terhadap perusahaan besar, menengah ataupun kecil, terutama terkait dengan timbulnya polusi yang merupakan dampak dari proses produksi. Polusi ini dapat berupa polusi udara, polusi air limbah, polusi suara, bahkan polusi mental kejiwaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut agar bertanggung-jawab atas kerugian yang dialami masyarakat disamping konsekuensi yang lainnya. Post, et al (2002) menyatakan bahwa secara simultan perusahaan akan menjalankan tiga jenis tanggung-jawab yang berbeda-beda kepada para pemangku kepentingan, yang harus dijalankan secara seimbang.

Ketiga tanggung-jawab tersebut mencakup:

- (1) *Economics responsibility*, perusahaan korporasi dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan laba secara optimal. Tanggung-jawab ekonomi di antaranya kepada para pemegang saham (pembagian deviden), meningkatkan nilai perusahaan berupa saldo laba (*retained earning*), dan tanggung jawab ekonomi terhadap para kreditor untuk membayar cicilan dan bunga pinjaman.
- (2) *Legal responsibility*, dalam melaksanakan operasionalnya perusahaan harus mematuhi berbagai peraturan perundangan yang berlaku sebagai bentuk tanggung-jawab perusahaan.
- (3) *Social responsibility*. tanggung jawab ke tiga yang harus dijalankan perusahaan adalah tanggung-jawab sosial perusahaan. Kotler dan Lee (2005) memberi penekanan pada komitmen perusahaan secara sukarela untuk turut meningkatkan kesejahteraan komunitas dan bukan merupakan aktivitas bisnis yang diwajibkan oleh hukum dan perundangan seperti kewajiban membayar pajak, atau kepatuhan terhadap perundangan ketenaga-kerjaan.

Bila dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, etika bisnis merupakan penerapan tanggung-jawab sosial suatu bisnis yang timbul dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Seperti halnya manusia pribadi juga memiliki etika pergaulan antar manusia, maka pergaulan bisnis dengan masyarakat umum juga memiliki etika pergaulan yaitu etika pergaulan bisnis. Etika pergaulan bisnis dapat meliputi beberapa hal antara lain:

- Hubungan antara bisnis dengan konsumen/ pelanggan.
Hubungan antara bisnis dengan pelanggan merupakan hubungan yang banyak dilakukan. Oleh karena itu pebisnis harus menjaga etika pergaulannya secara baik. Beberapa contoh pergaulannya dengan pelanggan/konsumen antara lain pemberian servis purna jual misalnya memberi garansi pada pemakaian produk selama jangka waktu tertentu; memberi penjelasan tentang bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk pada kemasannya; pemberian label halal yang memang dijamin kebenarannya; dan lain sebagainya.
- Hubungan Manajer dengan karyawan.

Manajer adalah salah satu kunci apakah perusahaan akan bertindak etis atau tidak. Sebagai pembuat keputusan utama, manajer memiliki kesempatan lebih besar bila dibandingkan dengan yang lain untuk memulai upaya etis perusahaannya. Hubungan yang etis dengan karyawan antara lain meliputi hal-hal: penetapan tarif upah sesuai aturan; pemberian insentif/bonus bagi karyawan yang berprestasi; perhatian pada kesejahteraan dan kesehatan; pemutusan hubungan kerja (PHK) harus didasari alasan yang jelas; pelatihan kerja untuk peningkatan keterampilan; promosi jabatan dan lain sebagainya.

- Hubungan antar pebisnis.

Hubungan antara perusahaan satu dengan lainnya dapat terjadi misalnya antara perusahaan dengan para pesaing, dengan penyalur, dengan grosir, dengan distributor, dengan pemasok bahan dan lainnya. Dalam menjalin hubungan dengan pihak-pihak tersebut tidak jarang terjadi benturan-benturan kepentingan. Untuk menghindari perselisihan yang memuncak, maka tindakan yang etis merupakan kunci keberhasilannya, yaitu harus jujur, janji harus ditepati, dan saling menguntungkan.

- Hubungan dengan Investor.

Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan terutama yang akan atau sudah "go publik" harus selalu memberi informasi secara lengkap, benar, dan dapat dipertanggung-jawabkan mengenai kondisi dan prospek perusahaannya. Informasi yang tidak jujur akan menjerumuskan para investor ketika mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Jangan sampai terjadi manipulasi data perusahaan atau pemberian informasi yang tidak jujur demi kepentingan sepihak. Untuk itu maka pemerintah membentuk BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ini.

- Hubungan dengan pemerintah.

Hubungan perusahaan dengan pihak pemerintah, biasanya terkait dengan urusan pembayaran pajak (Dinas Pajak); urusan ketenaga-kerjaan (Depnaker); urusan perijinan (Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian) dan lain-lain. Untuk itu maka perusahaan harus memberikan laporan yang benar sehingga tidak terjadi kecenderungan ke arah yang merugikan pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

3. Pendidikan Etika Bisnis Penting Bagi Masyarakat

Dunia bisnis yang bermoral akan mampu mengembangkan etika (patokan/ rambu-rambu) menjamin kegiatan bisnis yang seimbang, selaras dan serasi. Dengan beretika dalam bisnis maka akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan.

Dampak nyata akibat ketidak-pedulian pebisnis terhadap etika bisnis adalah kerusakan lingkungan hidup ; kebiasaan pemberian suap yang semakin serius dan merusak tatanan sosial budaya masyarakat; penipuan/ pemalsuan; dan pencurian idea-idea/ pembajakan produk. Jika ini berlanjut, bagaimana mungkin investor asing tertarik menanamkan modalnya di negeri kita? Situasi ini menimbulkan pertanyaan

*Balance Economics, Business, Management and Accounting Journal Th. V No. 8 Jan 2008.
Published by Faculty of Economic Muhammadiyah Surabaya ISSN 1693-9352*

tentang mengapa hal ini terjadi? Apakah para pengusaha tersebut tidak mendapatkan pembelajaran etika bisnis di bangku kuliah? Apa yang salah dengan pendidikan kita? karena seharusnya lembaga pendidikan berfungsi sebagai *morale force* dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran dan khususnya nilai-nilai dalam berbisnis.

Bagaimana sebenarnya etika bisnis diajarkan di sekolah—kalaupun ada—dan di perguruan tinggi? Etika bisnis merupakan mata kuliah yang diajarkan di lingkungan pendidikan tinggi yang menawarkan program pendidikan bisnis dan manajemen. Beberapa kendala sering dihadapi dalam menumbuh-kembangkan etika bisnis di dunia pendidikan.

Pertama, kekeliruan persepsi masyarakat bahwa etika bisnis hanya perlu diajarkan kepada mahasiswa program manajemen dan bisnis karena pendidikan program ini bertujuan mencetak lulusan sebagai calon-calon pengusaha profesional. Persepsi demikian tentu kurang tepat. Sebab pada hakekatnya yang terlibat dalam kegiatan bisnis adalah seluruh masyarakat, hanya peran yang dimainkan berbeda-beda. Ada yang berperan sebagai pengusaha/ produsen, sebagai konsumen, sebagai investor, dan sebagainya. Bila saat ini seseorang yang berprofesi sebagai karyawan, tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari beralih profesi menjadi pebisnis yang sukses. Oleh karena itu lebih tepat apabila pendidikan dasar berbisnis yang disertai dengan pendidikan etika bisnis diberikan pada program/jurusan lainnya. Selain itu pendidikan etika bisnis adalah sarat dengan nilai-nilai yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maka semestinya pendidik berperan sebagai model panutan/keteladanan dalam aplikasi pembelajaran etika bisnis tersebut. **Kedua**, nilai-nilai moral dan etika dalam berperilaku bisnis akan lebih efektif diajarkan pada saat usia emas (*golden age*) anak, yaitu usia 4–6 tahun. Karena itu, pembelajaran harus bersifat tematik. Misalnya pada mata pelajaran agama, guru bisa mengajarkan etika bisnis dengan memberi contoh bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdagang meski mengambil keuntungan, namun tidak setinggi langit. **Ketiga**, orang tua beranggapan bahwa adalah suatu hal yang tidak mungkin mengajarkan anak di rumah tentang etika bisnis karena mereka bukan pengusaha. Pandangan sempit ini dilandasi pemahaman bahwa etika bisnis adalah urusan pengusaha. Padahal, sebenarnya penegakan etika bisnis juga menjadi tanggung jawab konsumen. Contoh :Orang tua dapat mengajarkan etika bisnis di lingkungan keluarga dengan jalan memberi pemahaman yang disertai keteladanan pada anak misalnya dalam menghargai hak atas kekayaan intelektual. Maka tidak membeli VCD, game software, dan produk bajakan lain dengan alasan yang penting murah. **Keempat**, Selain melalui jalur formal (Sekolah) dan informal (keluarga), pendidikan etika bisnis seharusnya juga dilaksanakan oleh manajemen perusahaan, sebagai pihak yang paling bertanggung-jawab terjadinya pelanggaran-pelanggaran etika bisnis di masyarakat. Dalam hal ini perusahaan dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab sosial (Corporate Social Responsibility) yaitu merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja bersama karyawan perusahaan, komunitas setempat dan masyarakat secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Perusahaan dapat menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan etika bisnis untuk level manajer, level karyawan, dan level stakeholder secara berkala.

Dengan demikian untuk mempersiapkan pengembangan diri dan kesadaran berbisnis yang etis, maka masyarakat perlu diberi pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

4. Kegiatan Bisnis Harus Beretika

Dalam hubungannya dengan masyarakat, diharapkan pebisnis mengutamakan *performance* etika tingkat tinggi dan *social responsibility*. Perusahaan dan pekerja yang gagal memenuhi keinginan / permintaan publik akan jadi sorotan, dikritis dan dihukum. Berdasarkan dimensi etika bisnis, perusahaan sabagai agen moral harus menerapkan perilaku etis dalam melaksanakan bisnisnya. Mengapa bisnis harus etis? Menurut Post et all (2002) setidaknya ada tujuh alasan mengapa perusahaan menjalankan bisnis secara etis, yaitu :

- (1) Meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Perusahaan yang tidak berhasil dalam menjalankan bisnisnya secara etis akan mendapat sorotan, kritik, bahkan hukuman.
- (2) Agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan stakeholder lainnya.
- (3) Penerapan etika bisnis perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini dapat dicapai melalui terjadinya penurunan resiko korupsi, manipulasi, penggelapan, dan berbagai bentuk perilaku tidak etis lainnya.
- (4) Penerapan etika bisnis seperti kejujuran, menepati janji, dan menolak suap dapat meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara dua pihak yang melakukan hubungan bisnis.
- (5) Agar perusahaan terhindar dari penyalah-gunaan yang dilakukan karyawan maupun kompetitor yang bertindak tidak etis.
- (6) Penerapan etika perusahaan secara baik di dalam suatu perusahaan dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja (*employers*).
- (7) Mencegah agar perusahaan (yang diwakili para pemimpinnya) tidak mendapatkan sanksi hukum yang disebabkan menjalankan bisnis secara tidak etis.

Dalam menciptakan etika bisnis, Dalimunthe (2004) menganjurkan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pengendalian diri
- Pengembangan tanggung-jawab sosial
- Mempertahankan jati diri
- Menciptakan persaingan yang sehat
- Menerapkan konsep pembangunan Berkelanjutan
- Menghindari sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi, Kolusi dan Komisi)
- Mampu menyatakan yang benar itu benar
- Menumbuhkan sikap saling percaya antar para pengusaha
- Konsekuen dan konsisten dengan aturan main bersama
- Memelihara kesepakatan

- Menuangkan ke dalam hukum positif.

Dengan demikian dalam menjalankan kegiatan bisnis, harus disertai penerapan nilai-nilai etis sehingga mendatangkan manfaat bagi pebisnis itu sendiri dan di sisi lain sangat tidak merugikan kepentingan stakeholder (para pemangku kepentingan) seperti konsumen, kreditor, lembaga keuangan, supplier, dan pemerintah.

5. Kehidupan Yang Ramah Lingkungan

Untuk dapat menjamin proses pembangunan yang berkelanjutan, maka perlu diperhatikan beberapa faktor determinannya. Faktor-faktor itu adalah pertumbuhan penduduk, kegiatan dan ekspansi industri, kebutuhan bahan-bahan konsumsi, polusi, serta sumber daya dukung lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan reaksi dan koreksi terhadap konsepsi pembangunan konvensional yang beranggapan bahwa alam memiliki kemampuan tak terbatas dalam penyediaan *ecological endowments* (sebagai ruang tempat kehidupan, tempat pembuangan limbah, fungsi rekreasi dan estetika, dsb.). Menurut paham konvensional ini antara pembangunan bidang ekonomi dan kelestarian merupakan dikotomi yang terpisah satu sama lain. Padahal sesungguhnya, keduanya memiliki hubungan sangat erat dan secara bersama-sama menjadi agenda nasional yang harus diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara. Artinya tanpa disertai dengan perlindungan lingkungan secara memadai, pembangunan akan kehilangan makna (*undermined*). Sebaliknya tanpa pembangunan, upaya perlindungan terhadap lingkungan akan menemui kegagalan. Dengan demikian hakikat dari pembangunan berkelanjutan, adalah terjadinya keseimbangan antara kepentingan ekonomis dengan kelestarian ekologis (ekologi adalah: Ilmu yang mempelajari tentang cara hidup makhluk hidup yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu ekosistem).

Dalam pembangunan yang berkelanjutan, dimana pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh terciptanya keseimbangan preservasi lingkungan dan peningkatan perekonomian, tentunya harus menghadapi tantangan-tantangan yang menghambatnya. Beberapa tantangan tersebut menurut Post, et al (2002) adalah:

- (1) Tantangan ekologi : masalah timbul ketika manusia mencoba untuk memaksimalkan keinginan individunya hanya untuk sementara waktu dan tidak berpikir untuk jangka panjang.
- (2) Salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan yaitu ledakan penduduk, karena setiap manusia hidup pasti akan menambah polusi air, tanah, dan udara.
- (3) Penyebab penting lainnya terhadap kerusakan lingkungan adalah kemiskinan dan ketidak-samaan kondisi antara negara miskin dengan negara maju dan angka kemiskinan di dunia masih sangat tinggi.
- (4) Kemiskinan menyebabkan: manusia berbuat apa saja untuk dapat bertahan hidup, termasuk merusak lingkungan hanya untuk makan, istirahat, minum atau bahkan mencari uang
- (5) Industrialisasi: Sejauh ini industrialisasi telah berdampak baik bagi pengentasan kemiskinan dan memperlambat pertumbuhan penduduk namun dengan industrialisasi ada masalah baru yaitu munculnya polusi yang

ditimbulkan industri-industri berupa polusi yang tak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga malah merusak lingkungan.

(6) Masalah lingkungan global:

- (1) Penipisan lapisan ozon : Lapisan ozon memiliki peran penting bagi keberlangsungan hidup manusia sebagai selimut bumi dari sinar matahari langsung.
- (2) Kerusakan lapisan ozon akan meningkat beberapa tahun mendatang, apalagi sekarang sudah terasa akibat kerusakan ini yaitu pemanasan global.
- (3) Pemanasan global: isu yang paling diperbincangkan akhir-akhir ini menunjukkan usia bumi yang sudah tua kerusakan alam terus menerus dilakukan sehingga terjadi pemanasan global. Adapun beberapa penyebab terjadinya pemanasan global yaitu penggundulan hutan, percepatan pertumbuhan penduduk, dan penggunaan CPCs.
- (4) Keaneka-ragaman hayati : Bumi diperkirakan memiliki 10 – 100 juta spesies yang hidup namun kini terhitung hanya tinggal 1,7 juta spesies yang hidup. Kepunahan makhluk hidup tak dapat dihindarkan karena kerusakan lingkungan yang tak terkontrol,

Respon masyarakat internasional menanggapi masalah lingkungan global di atas antara lain World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) adalah salah satu instansi yang aktif dalam usaha untuk pengaplikasian pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu tujuan WBCSD adalah berusaha untuk mendorong penggunaan manajemen berwawasan lingkungan dan mempromosikan kedekatan kerja-sama antara pelaku bisnis, pemerintah, dan organisasi lainnya.

Selain itu banyak pula pelaku bisnis yang memiliki inisiatif dalam rangka ikut melestarikan lingkungan hidup ketika mengaktualisasi kegiatan bisnisnya, misalnya menerapkan sistem manajemen lingkungan ISO 14000, program kemitraan dan bina lingkungan, dan lain sebagainya. Meskipun diakui bahwa perusahaan yang proaktif memperhatikan proses produksi “ramah lingkungan” ini memerlukan biaya sangat besar, namun manfaat jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran biaya tersebut. Dengan demikian apabila seluruh masyarakat sadar akan dampak apa yang muncul ketika perilaku kehidupannya ramah terhadap alam-lingkungannya, maka alam pun akan bersahabat dengan manusia penduduk bumi ini.

6. Pendidikan Etika Bisnis Membentuk Kesadaran Hidup yang Ramah Lingkungan

Penerapan nilai-nilai ekonomi khususnya pada pembelajaran etika bisnis di sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung pasti berhubungan dengan terbentuknya karakter seseorang. Menurut Gibson (1989:53), Skinner (1975:125), yaitu tentang dasar pemikiran bahwa perilaku itu sebagai hasil sebuah pembelajaran Gibson berpendapat bahwa perilaku individu yang timbul adalah sebagai akibat dari adanya interaksi melalui proses belajar di sekolah, dalam lingkungan masyarakat atau melalui interaksi media. Perilaku yang timbul sebagai akibat interaksi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk *covert behaviour* maupun *overt behaviour*. Secara teoritis perilaku itu bisa diarahkan kepada tujuan tertentu.

Dengan demikian pembentukan perilaku masyarakat untuk bersikap ramah terhadap lingkungan seperti mengeksploitasi alam sesuai dengan batas-batas

kewajaran; menghemat penggunaan energi yang berasal dari sumber daya alam (batu bara, minyak dan gas), tidak merusak lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan ekologis (hutan-hutan ditebangi secara besar-besaran maka menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, bahkan kekeringan yang sangat menyiksa di musim kemarau). Oleh karena itu maka diperlukan suatu proses pembelajaran baik melalui jalur pendidikan formal, non formal maupun pendidikan yang informal untuk menanamkan nilai-nilai etis tersebut sehingga pada gilirannya akan membentuk tatanan dan kebiasaan hidup yang berdampak positif bagi kehidupan masyarakat.

Seperti yang diungkapkan oleh Durkheim (1954) bahwa moralitas merupakan suatu sistem kaidah dan nilai yang diberikan oleh masyarakat. Dimana nilai dan kaidah itu tertanam dalam budaya melalui proses pembelajaran. Proses-proses non rasional, seperti identifikasi dan imitasi dengan orang tua, memainkan peran utama. Nilai-nilai moral ekonomi sebagai arahan perilaku normatif dalam masyarakat dituangkan dalam tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertera dalam GBHN (1998) bahwa: Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Tujuan normatif bangsa itu akan dioperasionalkan dalam tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran ekonomi mengarahkan siswa untuk memiliki kemampuan dalam memecahkan berbagai persoalan yang dihadapinya. Inilah kerangka acuan dasar yang harus dipakai untuk pembelajaran ekonomi yang tidak boleh lepas dari tujuan luhur bangsa. Sehingga hasil pembelajaran baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor akan berpola pada nilai-nilai luhur budaya bangsa. Jadi melalui pendidikan nilai-nilai etika dalam bisnis diharapkan peserta didik memiliki pengetahuan dan bekal untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang sengaja ataupun tidak pasti terlibat dalam kegiatan bisnis.

Kesimpulan

1. Etika bisnis adalah aplikasi dari pemikiran etika secara umum dalam perilaku bisnis dan mempunyai makna yang terfokus pada nilai-nilai dan norma-norma moral dalam kegiatan ekonomi dan bisnis.
2. Dalam kehidupan sehari-hari semua orang terlibat dalam kegiatan bisnis. Maka nilai-nilai etika bisnis perlu ditanamkan sedini mungkin, baik melalui jalur formal, non formal, maupun informal.
3. Dalam menjalankan kegiatan bisnis, harus disertai penerapan nilai-nilai etis sehingga mendatangkan manfaat bagi pebisnis itu sendiri dan di sisi lain sangat tidak merugikan kepentingan stakeholder (para pemangku kepentingan) seperti konsumen, kreditor, lembaga keuangan, supplier, dan pemerintah.
4. Kehidupan yang bersikap ramah terhadap lingkungan misalnya mengeksploitasi alam sesuai dengan batas-batas kewajaran; menghemat penggunaan energi

yang berasal dari sumber daya alam (batu bara, minyak dan gas), tidak merusak lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan ekologis (hutan-hutan ditebangi secara besar-besaran maka menimbulkan bencana banjir, tanah longsor, bahkan kekeringan yang sangat menyiksa di musim kemarau).

Saran

1. Pemerintah sebaiknya segera menyelenggarakan Pendidikan Etika Bisnis melalui jalur pendidikan formal, dengan memaukkan dalam kurikulum mulai pendidikan tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat sering terjadinya tindakan yang tidak etis dan tidak bermoral di kalangan dunia bisnis. Dampaknya masyarakat luas yang dirugikan, seperti terjadinya kerusakan ekologis, kecurangan dalam transaksi bisnis dan sebagainya.
2. Di kalangan masyarakat bisnis sebaiknya juga menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan pembentukan kesadaran karyawan dan stakeholder untuk memahami etika dalam berbisnis.
3. Dalam lingkungan keluarga, para orang tua dihimbau untuk menanamkan dan menjadi teladan bagi putra-putrinya tentang kejujuran, kebersihan lingkungan, berlaku adil, menghormati pendapat orang lain dan sebagainya terkait dengan pembentukan moral dan etika dalam bermasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Durkheim, Emile (1954), *The Elementary Forms of Religious Life*, Macmillan, New York.

Gibson, James L., (1989), *Budaya Organisasi dan Manajemen*. (Terjemahan) Penerbit Erlangga. Jakarta

Post, James E (2002), *Business and Society*. McGraw- Hill Companies, Inc. North America

Samuel B. Bahcharach. *Education Reform: Making Sense of It All Education Reform Making Sense of It All*. Allyn and Bacon. USA